

BREBES MASA PENDUDUKAN JEPANG

Oleh: Aman

ABSTRAK

Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Kenyataan-kenyataan ekonomi yang buruk semasa pendudukan Jepang mengembang kan adanya korupsi dan penindasan elit tradisional terhadap rakyat kecil. Dari sebab itu rakyat belajar melawan tuntutan-tuntutan yang keterlaluan dari penguasa. Tidak sedikit reaksi masyarakat timbul dengan lenyapnya harapan pada Jepang sebagai “juru selamat” yang akan membebaskannya dari kekuasaan kolonial. Namun dalam kenyataannya pemerintah militer Jepang mempergunakan kaum elit birokrat dan tokoh-tokoh rakyat untuk politik penjajahannya yang memberatkan lapisan bawah. Politik pemerintah militer Jepang inilah yang memperlebar jurang perbedaan antara rakyat dengan pemimpinnya.

1. Pengantar

Setelah pemerintah kolonial Belanda menyerahkan Hindia-nya kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, ¹ maka pada tanggal 17 Maret penguasa-penguasa itu tiba di karisidenan Pekalongan, disaat wilayah ini belum pulih dari pergolakan sosial dan huru-hara dengan jatuhnya pemerintah kolonial. ² Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara tergesa-gesa atas gudan, jembatan dan instalasi di sekitar Tegal dan Brebes, termasuk tangki penyulingan minyak juga dihancurkan. Berikut akan dibahas tentang politik kolonial Jepang dan pergolakan masyarakat Brebes pada awal pendudukan Jepang.

a. Tragedi di Awal Pendudukan

Di Kabupaten Brebes dan semua wilayah Pekalongan, pemerintah kolonial Belanda memerintahkan agar semua mesin pabrik gula, pemintalan, dan tenun diambil.³ Sampai rantai sepeda harus dibuang dari sepedanya ke sungai agar tidak dapat digunakan musuh. Hal serupa tidak hanya terjadi di daerah sekitar pabrik gula saja, tetapi juga di seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Brebes bagian selatan, misalnya, banyak bangunan-bangunan masa kolonial

¹ Akira Nagazumi, *Pemberontakan Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1966, hlm.83.

² Lucas, *op. cit.*, hlm. 37.

³ Darsam al Martoni, *Wawancara*, 30 Mei 1996. dalam keterangannya Martoni menyebutkan bahwa mesin pabrik gula di Brebes, ada yang di bawa Belanda, sehingga Vatal tidak bisa digunakan.

Belanda seperti sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, banyak yang dibumihanguskan.⁴

Rakyat menyadari bahwa penguasa kolonial tidak mengetahui situasi peperangan yang sebenarnya, sehingga tidak mempunyai rencana apa yang harus dilakukan. Atas perintah sebuah badan baru yang bernama dinas perlindungan serangan udara, rakyat menggali lubang perlindungan yang cukup luas bagi setiap keluarga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Sampai-sampai orang sering bercanda “bila bom jatuh tidak perlu lagi menggali lubang kubur”, karena sudah tersedia.⁵

Dengan jatuhnya kekuasaan Belanda, pangreh praja di Karisidenan Pekalongan, termasuk pangreh praja yang ada di Kabupaten Brebes kehilangan tulang punggung kekuasaannya. Pangreh praja yang umumnya bertindak sebagai alat kolonial,⁶ hanya bisa menunggu tanpa daya sambil menyaksikan adanya perampokan yang menyebar cepat dari kecamatan satu ke kecamatan yang lainnya. Toko-toko milik cina, rumah-rumah gadai, dan penggilingan padi di kebanyakan daerah menjadi sasaran utama. Pangreh praja sendiri hamper tidak menghindari serangan dan seringkali menjadi obyek intimidasi massa yang bangkit kemarahannya. Polisi belanda dan para administrator tampak bingung untuk memaksakan kesewenangannya.

Hubungan rakyat dengan pangreh praja tercermin dari apa yang terjadi di Karisidenan Pekalongan. Setelah satuan penjaga kota dan polisi membubarkan

⁴ Ratam al Miranta, *Wawancara*, 3 April 1999.

⁵ Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999.

⁶ C. Van. Dijk, “Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia, alih bahasa Pustaka Utama Grafiti, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: PT. Temprint, 1963, hlm. 31.

diri, muncullah serombongan orang menyerbu memasuki halaman kabupaten dan mengambil pedang-pedang polisi yang tergantung di rumah jaga. Selagi istri bupati meminta bantuan, raden ario suryo terkejut dan jatuh pingsan. Sekretaris bupati segera menelpon residen Belanda, melaporkan apa yang sedang terjadi. Residen Belanda sudah tidak berdaya menghadapi kerusuhan-kerusuhan itu. Dan ketertiban era kolonial Belanda telah lenyap untuk selama-lamanya.⁷

b. Politik Pemerintah Militer Jepang

Politik pemerintah Jepang pada tahun 1942-1945 dianggap penting dalam memecahkan hubungan sosial-tradisional pada tingkat local, serta menyiapkan kondisi bagi terciptanya latar belakang revolusi nasional dan sosial tahun 1945. di antara sekian banyak perubahan sosial yang dialami masyarakat jawa selama pendudukan jepang itu, yang paling menonjol adalah perubahan masyarakat desa. Pada masa-masa akhir jaman Belanda, politik pemerintahan terutama terhadap pedesaan, dengan memberikan wewenang terhadap masyarakat pedesaan itu, dan sebanyak mungkin membiarkannya utuh. Tetapi di masa pendudukan Jepang, organisasi-organisasi pedesaan secara langsung dihubungkan dunia luar dalam pengertian politik, ekonomi dan spiritual. Untuk tujuan ini diperkenalkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang baru kepada masyarakat desa. Diantaranya adalah koperasi bentuk baru (kumisi) dan rukun tetangga (tonarigumi).⁸ Berbagai kebijaksanaan mobilisasi massa dijalankan pula oleh pemerintahan militer Jepang, dan hal ini telah membuka mata penduduk desa tentang pentingnya informasi. Melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan ini, mobilitas

⁷ Lucas, *op. cit.*, hlm. 39.

⁸ Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 84.

nasional ditingkatkan, dan penduduk desa mulai menyadari adanya dunia yang lebih luas, jauh dari batas-batas desa mereka.

Struktur otoritas tradisional di daerah-daerah pedesaan juga turut berubah. Selama jaman Belanda, hubungan antara pemimpin setempat dengan rakyat mempunyai sifat-sifat dasar feodal, dan sekurang-kurangnya masih memiliki hubungan pemberi-penerima. Tapi selama pendudukan Jepang, kepala desa dan para pembantunya diperlakukan sedikit lebih baik seperti wakil pemerintah pusat, dan menjalankan perintah dari atas untuk keuntungan pengusaha penjajahan.

Pada dasarnya, kebijakan politik Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: yakni menghapuskan pengaruh barat di kalangan rakyat, dan memobilisasi mereka demi kemenangan tentara Jepang. Seperti halnya Pemerintah Kolonial Belanda, pemerintah militer Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka banyak menghadapi masalah yang sama dengan yang dihadapi pemerintah Kolonial Belanda dan menggunakan banyak cara pemecahan yang sama, akan tetapi, di tengah suatu perang besar yang melakukan pemanfaatan maksimum atas sumber-sumber, pihak Jepang memutuskan untuk berkuasa melalui mobilisasi (khususnya Jawa dan Sumatera). Dengan berkembangnya suatu peperangan, maka usaha-usaha mereka semakin menggelora untuk memobilisasikan rakyat Indonesia.⁹

Untuk menghapuskan pengaruh Barat, maka pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa

⁹ Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 300-301.

Jepang. Pelarangan pemakaian buku-buku yang berbahasa Belanda dan Inggris, serta membuat pendidikan yang lebih tinggi. Kalender Jepang diperkenalkan untuk tujuan-tujuan resmi, patung-patung Belanda diruntuhkan, jalan-jalan diberi nama baru, begitu pula sekolah-sekolah diberi model baru. Suatu kampanye propaganda yang intensif dimulai untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk suatu tatanan baru di Asia. Para petani pun diberi pesan ini melalui pengeras-pengeras suara radio yang dipasang ditiang-tiang di tiap desa. Akan tetapi, upaya propaganda ini sering mengalami kegagalan karena adanya kenyataan-kenyataan pendudukan Jepang, yaitu adanya kekacauan ekonomi, terror, kerja paksa, dan penyerahan padi, kesombongan, dan kekejaman orang-orang Jepang pada umumnya. Pemukulan dan pemerkosaan, serta kewajiban memberi hormat kepada setiap orang Jepang. Orang-orang yang telah menyambut baik orang-orang Jepang, sebagai pembebas sering kali dengan cepat menjadi kecil hati.¹⁰

Bagaimanapun juga, kampanye anti Barat ini benar-benar mempertajam sentiment anti Belanda di seluruh kalangan masyarakat Indonesia di kalangan rakyat. Karena bahasa Jepang sedikit diketahui, maka bahasa Indonesia menjadi sarana bahasa yang utama untuk propaganda dan dengan demikian statusnya sebagai bahasa nasional semakin kokoh. Tetapi disamping ini pun pemahaman bahasa Jepang di kalangan masyarakat terus ditingkatkan.

¹⁰ *Ibid.*

Di Kabupaten Brebes, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang digembleng untuk dapat berbahasa Jepang. Usaha ini pada hakekatnya adalah untuk kepentingan Jepang dalam upaya menghilangkan pengaruh colonial Belanda dan mobilisasi masyarakat. Tentunya usaha ini diperuntukkan demi kestabilan politik Jepang di daerah pendudukan. Tokoh masyarakat yang sudah dianggap mampu berbahasa Jepang, diharuskan mengajarkannya kepada masyarakat, sampai bahasa Jepang dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Dalam bidang ketatanegaraan, pemerintah militer Jepang telah mengadakan perombakan sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 dari tanggal 5 Agustus 1942, kecuali bekas Kerajaan Suirakarta dan Yogyakarta, seluruh pulau Jawa dan Madura terbagi dalam *syuu*, *si*, *gun* dan *ku*. Daerah *syuu* sama dengan karesidenan, dan *syuu* terbagi lagi dalam *si* dan *ken*. Daerah *si* sama dengan daerah kotapraja, sedang daerah *ken* sama dengan daerah kabupaten. Daerah *gun* terbagi dalam *son* dan *ku* masing-masing sama dengan daerah kawedanan. Kecamatan dan desa. Untuk masing-masing daerah *si*, *ken*, *gun*, *son*, dan *ku*, dikepalai oleh seorang *si-cho*, *ken-cho*, *gun-cho*, *son-cho*, dan *ku-cho*. Untuk daerah kabupaten Brebes, sebagai penguasa daerah mula-mula dipegang oleh seorang pembesar bala tentara Jepang, tetapi kemudian digantikan oleh seorang kepala daerah bumi putera sebagai *ken-cho* (bupati), bernama Raden Sunarya. Ia memerintah hingga awal tahun 1945, sebelum saat proklamasi kemerdekaan 1945. pada waktu itu ia telah dimutasikan ke Tegal untuk menduduki jabatan yang sama. Sebagai pengganti Bupati Kabup[at]en Brebes,

¹¹ Darsam al-Martoni, *wawancara*, 30 Mei 1998. Beliau sendiri adalah sebagai salah satu guru yang mengajarkan bahasa Jepang di daerah Malandang, Kecamatan Salem Brebes.

pemerintah militer Jepang mengangkat Sarimin Rekasdiharaja sebagai bupati (*ken-cho*) Brebes.¹²

Disamping pembentukan daerah-daerah pemerintahan di atas, pemerintah militer Jepang juga mengeluarkan peraturan mengenai pembentukan *aza*, *tonarigumi*, dan *kumiai*. Menurut peraturan tersebut, masing-masing *ku* atau desa dibagi menjadi beberapa *aza* yang pada umumnya dibagi lagi dalam beberapa *tonarigumi* yang terdiri dari beberapa keluarga. *Aza*, diketuai oleh seorang *aza-cho* atau Rukun Kampung. Sedang *tonarigumi*, diketuai oleh seorang *kumi-cho* atau Rukun Tetangga. Sedangkan *kumini* merupakan sebuah perkumpulan koperasi dengan gaya Jepang.¹³ Begitu pula dengan *tonarigumi* yang meniru organisasi serupa di Jepang yang dibentuk beberapa tahun sebelum perang dunia II dalam rangka pembinaan ketahanan rakyat sewaktu mereka sedang menghadapi perang dengan Cina.¹⁴

Sampai pada bulan Agustus 1942, Jawa tetap berada di bawah struktur pemerintahan sementara, tetapi kemudian dilantik suatu pemerintahan sementara, tetapi kemudian dilantik suatu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang gubernur militer (*gunseiken*). Banyak orang Indonesia diangkat untuk mengisi tempat pejabat-pejabat Belanda yang diotawan, tetapi ;banyak pula pejabat-pejabat kebangsaan Jepang yang diangkat. Kebanyakan pejabat-pejabat baru yang berkebangsaan Indonesia itu adalah para mantan guru dan kepiondahan mereka

¹² Soedarmo, op. cit., hlm.71

¹³ Aiko Kuraswa, *Seri Pengkajian Kebudayaan Jepang, Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, hlm. 195

¹⁴ A. B. Lopian, *Di Bawah Pendudukan Jepang*. Jakarta: Penerbitan Sejarah Lisan, No. 4, arnas RI, 1966, hlm. 4

dari sistem pendidikan mengakibatkan mundurnya standar-standar pendidikan secara tajam.

Untuk membantu orang Jepang mengatur daerah pendudukan, maka disamping pejabat baru tersebut pihak Jepang di Jawa juga mencari pemimpin-pemimpin politik guna membantu semobilisasi rakyat. Pertama-tama mereka menghapuskan semua organisasi-organisasi politik dari jaman sebelum pemerintah militer Jepang. Pada bulan Maret 1942, semua kegiatan politik dilarang dan kemudian semua perkumpulan yang ada secara resmi dibubarkan dan pihak Jepang mulai membentuk organisasi-organisasi baru.

Pada bulan April 1942, usaha pertama pada suatu gerakan rakyat, “Gerakan Tiga A” dimulai di Jawa. Nama ini berasal dari slogan bahasa Jepang yang berarti Pemimpin Asia, Pelindung Asia dan Cahaya Asia. Pada umumnya gerakan tiga A ini tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Para pejabat Indonesia hanya sedikit memberi dukungan, tidak ada seorang nasionalis Indonesia yang terkemuka terlibat didalamnya, dan propagandanya ditangani secara keraas sehingga pada masa-masa awal pendudukan pun hanya sedikit orang Indonesia yang menanggapinya secara serius.¹⁵ Akhirnya memasuki awal tahun 1943, pihak Jepang mulai mengerahkan usaha-usaha pada mobilisasi. Gerakan-gerakan pemuda yang diberi prioritas tinggi dan ditempatkan dibawah pengawasan ketat pihak Jepang.¹⁶

2. Politik Pemerintahan Jepang: Masalah Perekonomian

¹⁵ Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 303

¹⁶ *Ibid.*

Divisi ke-16 tentara Jepang merupakan tentara yang pertama yang mendarat di bumi Indonesia. Merekalah pelaksana tugas dari kaisar Jepang untuk membangun apa yang mereka sebut “asia timur raya yang makmur dan sejahtera dibawah pimpinan Dai Nippon” dengan jalan memperoleh dan menguasai sumber alam dan manusia, khususnya bahan pangan dari Jawa, guna memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Pulau Jawa semakin menjadi penting sebagai basis suplai Jepang, sebagai sumber beras dan garam bagi Malaya. Sebaliknya Malaya sebagai satu-satunya sumber gula dan biji-bijian. Rokok, kina, dan bahan pokok logam juga merupakan ekspor penting dari Jawa.

Pada masa akhir perang, pemerintah akhir Jepang melaksanakan kebijaksanaan politik ekonomi “ mencukupi kebutuhan sendiri” (genchi jikatsu) di wilayah kedudukannya. Pada akhir 1943, angkutan khususnya kapal, antara Jepang dan daerah pendudukannya di asia tenggara menjadi sulit. Ketika posisi Jepang dalam peperangan melemah, penguasa Jepang memerintahkan semua pasukan di wilayah pendudukannya agar mau berswasembada. Kwajiban inilah yang mendasari kwajiban paksa mengumpulkan semua hasil perkebunan oleh pemerintah Jepang, pembagian dan penjatahan surplus produksi pertanian rakyat, khususnya padi dan lain-lain bahan kebutuhan hidup yang semakin langka serta perekrutan paksa tenaga kerja untuk membangun proyek di Jawa maupun diluar jawa. Ketakutan akan serangan dari selatan mendorong pemerintah militer Jepang untuk melakukan pengumpulan cadangan bahan pangan, mesiu di tempat-tempat terpilih di Jawa. Tertutupnya pasaran ekspor membuat industri gula di Jawa gulung tikat, jumlah pabrik yang beroperasi menurun dari 85 di tahun 1942

menjadi 13 ditahun 1945.¹⁷ dua dari 13 pabrik gula ini yakni pabrik gula pangkah dan banjaratma, di wilayah karisidenan pekalongan.¹⁸

Setibanya di karisidenan pekalongan, yang kemudian namanya diganti menjadi Pekalongan-shu, asisten residen baru Jepang yang bernama Toshio Ota, menyatakan:

“saya merasakan terbelahnya secara tajam masyarakat ini antara si kaya dan si miskin. Hanya segelintir pejabat tinggi berpendidikan barat versus sebagian besar rakyat Indonesia yang miskin. Selain itu ekonomi di tangan orang-orang cina, penduduk mempunyai kesempatan kecil sekali untuk memperoleh uang tunai, kecuali bagi kerja kasar yang diberi makan harian.....perkebunan-perkebunan belanda menguasai tanah yang terlalu luas atas kerugian kaum tani, sehingga banyak penduduk meninggalkan desa-desanya buat mencari kerja. Tampak disini banyak petani miskin saya merasa berkewajiban mengurangi perbedaan kesejahteraan ini sejauh mungkin.”¹⁹

Bagaimanapun prakarsa semacam ini nampaknya tidak tersebar luas di karisidenan Pekalongan, pelaksanaan politik swasembada ini, diandalkan sepenuhnya kepada pangreh praja yang pada jaman colonial belanda mempunyai peran ekonomi penting sebagai pengumpul pajak. Sedangkan peran itu sekarang ditambah dengan pengaturan pembagian bahan sandang dan bahan-bahan baku baku lainnya dari tingkat kecamatan kebawah. Merekapun bertanggung jawab atas penambahan romusa yang dikirim keberbagai proyek di dalam wilayah

¹⁷ produksi gula secara menyolok jatuh dari 1328000 ton dalam tahun 1942 menjadi 64000 dalam tahun 1945.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

karisidenan. Seluruh masyarakat Jawa menderita dan hubungan antara Pangreh Praja dan petani menjadi lebih buruk disbanding dengan pada jaman belanda.²⁰ Berikut ini kebijakan politik pemerintahan militer jepang dalam masalah perekonomian.

a. Politik Beras Dibawah Pemerintah Militer Jepang

Dibawah pemerintah militer jepang, jawa ditetapkan sebagai pemasok beras untuk pulau-pulau diluar Jawa, Malaysia, singapura, serta untuk pertempuran di pasifik selatan. Meskipun kapasitas beras di Jawa tidak sebesar beras di Siam dan Burma, yang mengekspor jutaan ton beras, jawa merupakan salah satu dari sedikit daerah penghasil beras di kepulauan Indonesia. Pada masa perang ketika angkutan jarak jauh sangat sulit kerana langkanya perkapalan dan memburuknya keamanan dilaut, artyi beras Jawa untuk bagian asia tenggara tersebut semakin meningkat. Lebih jauh lagi, beras di Jawa bermutu tinggi dan rasanya enak, yang lebih disukai oleh orang jepang dibandingkan dengan beras berbutir panjang yang dihasilkan di daratan asia tenggara. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang berkeinginan memperoleh beras dari Jawa, dan kebijakan mereka ditujukan untuk memaksimumkan produksi dan pengumpulan beras.

Lima bulan setelah menyerbu Jawa pada bulan Agustus 1942, pemerintah militer Jepang (gunseikanbu) mengambil langkah-langkah pertama kearah perolehan bahan pangan secara lebih sistematis. Sebuah organisasi untuk mengelola bahan pangan yang disebut shokuryo kanri zimusoho (SKZ), atau kantor pengelola

²⁰ Waltam Al Sumarta, *Wawancara*, 1 April 1999.

makanan, dibentuk dibawah depertemen perindustrian.²¹ SKZ dengan cabang-cabang di Semarang dan Surabaya, bertanggung jawab atas pengenalan seluruh proses pembelian dan distribusi beras di bawah monopoli menaga. SKZ menetapkan jumlah padi yang harus dibeli pemerintah dan menetapkan harga beras resmi, juga merancang program terperinci untuk distribusi beras. SKZ menyediakan modal dan memerintahkan penggilingan beras supaya membeli padi lebih banyak dari petani. Mereka diminta membeli dan menggiling padi untuk pemerintah. Tetapi sangat sedikit padi yang tersisa ditangan petani karena musim panen besar-besaran di Jawa pada masa itu telah lewat. Selama periode ini, disamping beras untuk pemerintah, penggilingan masih diperbolehkan berusaha sendiri untuk konsumsi local atas biaya sendiri. Jumlah padi yang dibeli penggilingan padi di Jawa Tengah selama periode ini, baik untuk SKZ, maupun untuk pemasokan local, terlihat pada table-1

Tabel-1

Padi yang dibeli oleh penggilingan padi di Jawa Tengah
Agustus 1942-maret 1943

| karisidenan | Pembelian untuk SKZ (ton) | Pembelian untuk konsumsi lokal | total |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Pekalongan | 10000 | 9757 | 19757 |
| Semarang | 5700 | 11676 | 17578 |
| Pati | 2750 | 5532 | 8282 |
| Kudus | 6302 | 11220 | 19522 |

²¹ Kurasawa, *op. cit.*, hlm. 67.

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------|
| Surakarta | 2150 | 274 | 2424 |
| jumlah | 26902 (42,6%) | 38859 (57,2%) | 87561 |

Sumber : Aiko Kurasawa, *Ibid.*

Menurut angka-angka ini, 42,6% beras yang dibeli diperuntukkan pemerintah militer Jepang. Kerena data yang tidak lengkap, baik dalam hal wilayah maupun dalam hal rentang waktunya, angka-angka ini mungkin tidak selalu mewakili perbandingan sesungguhnya dari padi yang diperoleh pemerintah militer Jepang selama masa pendudukan, tetapi barangkali bisa memberi sekedar gambaran mengenai perolehan beras oleh pemerintah Jepang pada tahap awal pendudukan.

b. Wajib Serah Padi

Bagi seorang Jawa, padi atau beras merupakan bahan makanan pokok, dan mereka sering mengatakan “kalau belum makan nasi” berarti belum makan” mereka lebih menyukai beras dari pada padi-padian jenis lain, dan selama mereka masih mampu, mereka lebih suka mengisi perutnya dengan nasi saja.²²

Sebagian besar petani Jawa merupakan pengolah lahan dalam ukuran sangat kecil, dan bekerja diatas lahan yang terpotong-potong seluas kurang dari 0,5 hektar, milik sendiri atau disewa. Biasanya mereka menghasilkan panen yang hanya cukup untuk konsumsi sendiri, atau bahkan kurang. Sejak awal tahun beras yang baru, yaitu April 1943, pasar beras bebas sama sekali dilarang, dan petani diharuskan untuk menyerahkan sejumlah tertentu dari hasil panen mereka kepada pemerintah.²³

²² Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999. Lihat juga Nagazimi, *op. cit.*, hlm.67.

²³ Darwa Al Tirta, *Wawancara*, 2 April 1999.

Kewajiban paksa menyetor padi kepada penguasa Jepang merupakan kewajiban terberat bagi mayoritas diantara sekian banyak kebijaksanaan politik Jepang dimasa perang itu. Petani diwajibkan menyetorkan padinya kepada Negara secara paksa.²⁴ Kebutuhan beras bagi pemerintah militer Jepang yang dalam keadaan perang terlihat pada table-2. setelah kebutuhan tentara dan sipil Jepang terpenuhi, beras dibagikan kepada petani sebagai kelompok pendukung perang yang di anggap penting, yang di sebut “semi militer”, yaitu peta (pembela tanah air), Heiho (pasukan bantuan), romusa, pangreh praja dan tenaga ahli. Dengan adanya politik menyediakan cadangan beras yang dimulai pada tahun 1943 guna menghadapi kemungkinan bahaya serangan dari selatan, nampaknya para tentara dan sipil mengumpulkan bahan pangan dalam jumlah yang melebihi batas. Harga belinyapun menjadi amat rendah, hamper seperti penyitaan. Menurut parhitungan kasar, jumlah permintaan padi seluruhnya mencapai 38% dari produksi padi Jawa pada tahun 1944 (lihat table-2).

Table-2

Kebutuhan beras untuk kebutuhan Jepang dan pendukungnya di Jawa

| Golongan | Jumlah (ton) |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Cadangan untuk Militer | 17000 |
| Angkatan Darat Divisi Ke-16 (Tentara Pendudukan di Jawa) | 363000 |
| Sumbangan untuk markas besar (tentara Jepang di Singapura) | 17000 |
| Kebutuhan-kebutuhan semi militer | 40000 |
| | 1150000 |

²⁴ Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999

| | |
|--------|---------|
| Jumlah | 1567000 |
|--------|---------|

Sumber : Miyamoto, *Jawa*, Tokyo, 1973. diambil dari lucas, 1969, hlm.42.

Ditingkat karisidenan ke bawah, keadaan sebenarnya lebih buruk lagi. Secara pukul rata di karisidenan pekalongan terjadi penambahan jumlah setoran untuk menutup yang menguap karena korupsi, jumlah setoran di kabupaten ditempatkan oleh pejabat setempat.

Pada table-3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib serah padi berbeda-beda antara kabupaten, dan bahkan antara kecamatan dan desa didalam setiap kabupaten di karisidenan Pekalongan. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi dampak wajib serah padi dari daerah satu dengan daerah yang lainnya adalah kualitas tanah, sikap para camat dan kepala desa sebagai pejabat setempat, dan juga pejabat Jepang sendiri. Cara menentukan setoran paksa dan pelaksanaannya juga berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.

Untuk kabupaten bribes, setoran padi paksa mulai melunak setelah adanya suatu perjanjian antara bupati sarimin dengan pemerintah militer Jepang, bahwa bagian kuota setoran kabupaten dapat disetorkan dalam bentuk beras. Sebelumnya seperti di daerah-daerah lain di kabupaten Brebes ini, semua setoran harus dalam bentuk padi dan harus diserahkan kepada penggilingan swasta milik orang-cina.²⁵ Setelah diambil untuk kebutuhan orang-orang Jepang (militer dan sipil), barulah sisanya di distribusikan melalui koperasi pertanian (Nogio Kumiai). Dengan adanya penggilingan padi, setoran oleh pabrik-pabrik milik orang-orang cina ini berarti bahwa hasil sampingan seperti meniran, dedak dan sekam yang berharga bagi

²⁵ Lucas, *op, cit.*, hlm.43.

petani lenyap, sehingga petani terpaksa harus membeli kembali dari pabrik penggilingan guna memberi makan unggas dan ternaknya. Di dalam aturan baru di kabupaten bribes, penumbukan padi diijinkan untuk dilakukan ditiap desa.²⁶ Para penumbuk bekerja dengan upah berupa beras, meniran, sekam, dan dedak. Para pedagang lalu mengumpulkan beras itu guna disetorkan ke pusat-pusat pengumpulan yang di tentukan, seperti halnya lumbung-lumbung padi di tiap desa.²⁷

Table-3

Setoran paksa padi diberbagai wilayah di tiga daerah semasa pendudukan Jepang

| Lokasi | Hasil rata-rata (ton/ha) | Jumlah rata-rata yang diminta (ton/ha) | Persentase hasil panen |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Kabupaten Brebes | | | |
| Kecamatan bribes | 2,0-2,5 | 1,0 | 50 |
| Kecamatan losari | 2,5 | 1,0 | 50 |
| Desa ketanggungan | 2,3 | 0,4-0,6 | 14-25 |
| Kabupaten tegal | | | |
| Kecamatan bumijaya | 2,1 | 0,3 | 14 |
| Kecamatan talang | 2,0-4,0 | 1,0 | 25-50 |
| Kabupaten pemalang | | | |

²⁶ Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999

²⁷ Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999

| | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|
| Kawedanan belik | 1,4 | 1,5 | 105 |
| Desa cibuyur | 2,1-2,8 | 0,5 | 14-16 |
| Kecamatan taman | 2,1-2,8 | 0,8-1,8 | 40-50 |
| Desa ambowetan | 2,6-4,2 | 2,6-3,9 | 50 |
| Kecamatan ampel | | | |
| Gading | 2,8 | 1,4 | 50 |

Sumber: Lucas, 1969, hlm.45.

Selain itu penguasa mengambil tindakan untuk mengawasi korupsi. Di kecamatan tonjong, kabupaten Brebes tidak ada distribusi dari kumisi (koperasi yang di buat Jepang) melalui kepala rukun kampong dan rukun tetangga sehingga akan memudahkan pengawasan. disini camat akan menggilir mereka yang ditunjuk untuk melakukan distribusi, sehingga tidak selalu harus lurah, jika ada korupsi salah satu desa dalam kecamatannya, camat mengganti semua pegawai di desa tersebut. Itu dapat dikatakan sebagai penyelewengan bergantian. Setidak-tidaknya untuk daerah kabupaten Brebes, mereka tidak dapat berbuat curang untuk jangka waktu yang lama.²⁸

c. Romusa : Eksploitasi Tenaga Kerja

Jika seorang Indonesia yang hidup semasa pendudukan Jepang diminta untuk mengatakan tentang pengalaman apa yang paling mengerikan selama pendudukan Jepang, mungkin ia akan menjawab Romusa. Secara harfiah, romusa berarti seorang pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar. Akan tetapi, dalam kontek sejarah Indonesia, istilah ini mempunyai pengertian khusus yang

²⁸ Lucas, *op. cit.*, hlm.47.

mengingatkan rakyat akan pengalaman yang sangat pahit dibawah pemerintah militer yang kejam. Bagi rakyat Indonesia, romusa berarti seorang buruh kuli yang dimobilisasikan sebagai seorang buruh kasar dibawah kekuasaan militer Jepang. Jutaan orang Jawa dimobilisasikan dengan cara ini dan tidak sedikit diantaranya yang dikirim keluar Jawa.²⁹

Dengan sistem romusanya, pemerintah militer Jepang telah membuat karisidenan pekalongan termasuk kabupaten Brebes sebagai proyek kerja paksa raksasa. Selain untuk dipekerjakan di Jawa, tentara jepang menugaskan 226000 untuk bekerja diluar Jawa. Tetapi karena kesulitan transportasi, pelaksanaan program ini sepenuhnya terhambat. Karena kurangnya gizi dan perlakuan-perlakuan diluar batas pri-kemanusiaan terhadap romusa, maka para pemimpin romusa di kabupaten Brebes, membuat situasi lebih rumit. Tidak jarang pemimpin romusa yang memanipulasi data dalam perhitungan jumlah pekerja. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu banyak masyarakat yang ikut romusa dalam suatu waktu sehingga dapat bergiliran dalam pelaksanaannya.³⁰

Dalam teori, pemerintah militer Jepang mempunyai dua macam pemngarahan tenaga kerja, yaitu; *kinrohoshi* (kerja bakti) yang diselenggarakan ditingkat kabupaten kebawah; dan *romusa*, buruh kasar yang diorganisasikan langsung oleh penguasa militer pusat. Perekrutan dan transportasi romusa menjadi tanggung jawab *Romu kyokai*, atau semacam jawatan tenaga kerja setempat. Perekrutan dipimpin oleh seorang pangreh praja yang juga menjadi ketua BP3 (badan pembantu prajurit bekerja) setempat. Jawatan tenaga kerja tadi berkewajiban

²⁹ Kurasawa, *op. cit.*, hlm. 123.

³⁰ Kemo, *Wawancara*, 16 Januari 1999. beliau sendiri adalah seorang pemimpin romusa sector selatan yang dikirim ke Brebes tengah untuk membangun jalan Salem-Tanjung.

menentukan jatah romusa ditingkat kabupaten dan kawedanan. *Kinrohoshi* mengerjakan proyek-proyek pertahanan militer, yang dalam kenyataan juga merupakankerja paksa yang hamper tidak mendapat jaminan sama sekali. Jika para romusa dan kinrohoshi hendak bekerja, mereka harus membawa bekal sendiri, baik yang berupa beras maupun makanan lainnya.³¹ Hal ini karena jatah makanan untuk romusa tidak seluruhnya diberikan oleh pangreh praja setempat.³² Perbedaan keterlibatan pangreh praja dan kaum pergerakan pertama-tama terletak dalam tanggung jawabnya yang menentukan golongan tenaga kerja yang di rekrut. Pangreh praja bermaksud merekrut romusa yang akan dipekerjakan didalam dan diluar wilayah karisidenan, sedangkan kaum pergerakan diberi tugas propaganda untuk “Asia Timur Raya” dan jadi pembangkit semangat bagi pelaksanaan program-program Jepang. Barang kali karena peran semacam inilah maka pergerakan tidak menghimpun kebencian rakyat seperti pangreh praja yang sering hanya memberi janji-janji kosong. Para pemimpin pergerakan berusaha menggunakan proyek-proyek romusa sebagai pembagian makanan bagi simiskin, walaupun tidak mungkin mengawasi jatah makanan harian mereka yang dikirim keluar wilayah karisidenan. Berikut ini pengalaman Kemo saat menjadi pemimpin romusa di kabupaten Brebes :

“pada jaman Romusnya Jepang, saya hendak membantu masyarakat yang kekurangan pangan, yakni dengan kesediaan saya menjadi pemimpin romusa. Saya diberi wewenang untuk menjadi pengerah romusa. Saya mengangkat 60 orang untuk dipekerjakan di Bribes bagian tengah. Saya berusaha memanipulasi

³¹ Ratam Al Miranta, *Wawancara*, 3 April 1999.

³² Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999

jumlah pekerja, dengan mencantumkan 100 orang dibawah pimpinan saya. Dengan demikian, jepang memberikan jatah makan untuk 100 orang yang sebenarnya adalah 60 orang. Oleh karena itu terdapat kelebihan jatah 40 orang, yang dibagi rata pada 60 orang romusa dibawah pimpinan saya.³³

Oleh sebab itulah, wajar jika para pemimpin romusa tidak menjadi sasaran amukan massa ketika revolusi sosial bergolak.

DAFTAR PUSTAKA/blum edit

¹. Akira Nagazumi, *Pemberontakan Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1966

¹ Darsam al Martoni, *Wawancara*, 30 Mei 1996. dalam keterangannya Martoni menyebutkan bahwa mesin pabrik gula di Brebes, ada yang di bawa Belanda, sehingga Vatal tidak bisa digunakan.

¹ Ratam al Miranta, *Wawancara*, 3 April 1999.

¹ Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999.

³³Kemo, *Wawancara*, 16 April 1999

¹ C. Van. Dijk, “ Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia, alih bahasa Pustaka Utama Grafiti, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: PT. Temprint, 1963, hlm. 31.

¹ Darsam al-Martoni, *wawancara*, 30 Mei 1998. Beliau sendiri adalah sebagai salah satu guru yang mengajarkan bahasa Jepang di daerah Malandang, Kecamatan Salem Brebes.

¹ Aiko Kuraswa, *Seri Pengkajian Kebudayaan Jepang, Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, hlm. 195

¹ A. B. Lopian, *Di Bawah Pendudukan Jepang*. Jakarta: Penerbitan Sejarah Lisan, No. 4, arnas RI, 1966, hlm. 4

¹ Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 303

¹ produksi gula secara menyolok jatuh dari 1328000 ton dalam tahun 1942 menjadi 64000 dalam tahun 1945.

¹ Waltam Al Sumarta, *Wawancara*, 1 April 1999.

¹ Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999. Lihat juga Nagazimi, *op. cit.*, hlm.67.

¹ Darwa Al Tirta, *Wawancara*, 2 April 1999.

¹ Kemo, *Wawancara*, 16 Januari 1999. beliau sendiri adalah seorang pemimpin romusa sector selatan yang dikirim ke Brebes tengah untuk membangun jalan Salem-Tanjung.

¹ Ratam Al Miranta, *Wawancara*, 3 April 1999.

¹ Sarfi, *Wawancara*, 3 April 1999

¹Kemo, *Wawancara*, 16 April 1999